



## Pengaruh Fungsi Anggaran dan Kinerja Panitia Kerja (Panja) terhadap Efektivitas Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon

Della Michelle Selanno<sup>1\*</sup>, Petronela Sahetapy<sup>1</sup>, Hendry Selanno<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

\*Corresponding author email: [dellamichelleselanno@gmail.com](mailto:dellamichelleselanno@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received Augustus 19, 2025  
Approved November 20, 2025

#### Keywords:

Budget Function, PANJA  
Performance, Ranperda  
Effectiveness

#### ABSTRACT

*This study aims to examine the influence of the DPRD budget function and the performance of the Working Committee (PANJA) on the effectiveness of Draft Regional Regulation (Ranperda) preparation in the Ambon City DPRD. The research employed a quantitative survey approach. The population consisted of DPRD members and PANJA members involved in Ranperda preparation. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination ( $R^2$ ). The results indicate that the DPRD budget function positively and significantly affects the effectiveness of Ranperda preparation (Sig. = 0.002), while PANJA performance has a positive and highly significant effect (Sig. < 0.001). Simultaneously, both independent variables significantly influence the effectiveness of Ranperda preparation (Sig. < 0.001), accounting for 78.2% of the dependent variable's variance. These findings highlight that effective Ranperda preparation requires synergy between well-planned budgeting and professional technical execution by PANJA. The study implies the need to enhance DPRD members' capacity in budgeting functions, optimize PANJA performance through training and evaluation, and ensure intensive coordination between both parties to produce high-quality regional regulations that impact local development.*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fungsi anggaran DPRD dan kinerja Panitia Kerja (PANJA) terhadap efektivitas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Kota Ambon. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian terdiri dari anggota DPRD dan anggota PANJA yang terlibat dalam penyusunan Ranperda. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda, uji t, uji F, serta koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi anggaran DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penyusunan Ranperda (Sig. = 0,002), sementara kinerja PANJA memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan (Sig. < 0,001). Secara simultan, kedua variabel independen ini berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penyusunan Ranperda (Sig. < 0,001) dengan kontribusi sebesar 78,2% terhadap variabilitas variabel dependen. Temuan ini menegaskan bahwa penyusunan Ranperda yang efektif membutuhkan sinergi antara perencanaan anggaran yang matang dan pelaksanaan teknis yang profesional dari PANJA. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam fungsi anggaran, optimalisasi kinerja PANJA melalui pelatihan dan evaluasi, serta koordinasi yang intensif antara keduanya untuk menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas dan berdampak bagi pembangunan daerah..



**How to cite:** Selanno, D. M., Sahetapy, P., & Selanno, H. (2025). Pengaruh Fungsi Anggaran dan Kinerja Panitia Kerja (Panja) terhadap Efektivitas Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2834–2844. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4660>

## PENDAHULUAN

Fungsi anggaran dalam sistem pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan yang demokratis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Fungsi ini tidak sekadar menetapkan angka dalam dokumen APBD, tetapi juga menjadi instrumen politik fiskal yang menjembatani aspirasi publik dengan prioritas pembangunan (Siburian & Sinaga, 2025). Anggaran menjadi dasar pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan regulasi seperti Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Efektivitas fungsi anggaran menentukan sejauh mana kebijakan publik dapat diwujudkan dalam bentuk regulasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kualitas perencanaan dan penganggaran sangat memengaruhi hasil legislatif di tingkat daerah. Dengan demikian, fungsi anggaran bukan hanya administratif, tetapi juga strategis. Ini menegaskan pentingnya integrasi antara anggaran dan proses legislasi (Yovitasari, 2024).

Dalam struktur DPRD, Panitia Kerja (PANJA) memiliki peran sentral dalam pembahasan anggaran dan legislasi. PANJA dibentuk untuk menelaah lebih mendalam materi yang diajukan oleh eksekutif, memberikan saran, serta rekomendasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif (Asapa et al., 2023). Kinerja PANJA yang optimal menentukan kualitas regulasi daerah dari segi substansi dan ketepatan waktu pembahasan. PANJA idealnya bekerja berdasarkan prinsip efisiensi, objektivitas, dan independensi dalam menilai dokumen yang akan disahkan. Dengan demikian, PANJA berfungsi sebagai motor penggerak proses legislasi yang efektif. Tanpa kinerja PANJA yang baik, regulasi yang dihasilkan berpotensi tidak relevan dengan kebutuhan daerah. Hal ini menjadikan PANJA sebagai variabel penting dalam efektivitas penyusunan Ranperda (Mahdi, 2024).

Efektivitas penyusunan Ranperda merujuk pada kemampuan DPRD menghasilkan produk hukum yang relevan dan implementatif. Ranperda harus disusun sesuai tata aturan yang berlaku dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Beberapa indikator efektivitas mencakup ketepatan waktu pembahasan, relevansi isi, partisipasi publik, serta kesinambungan dengan arah pembangunan jangka menengah (Narang, 2025). Proses legislasi idealnya bersifat substantif, di mana setiap produk hukum lahir dari analisis mendalam yang didukung data dan aspirasi masyarakat. Penyusunan Ranperda bukan sekadar formalitas, melainkan refleksi dari perencanaan strategis daerah. Kualitas Ranperda menjadi tolok ukur profesionalisme DPRD dalam menjalankan fungsi legislatifnya. Dengan demikian, efektivitas penyusunan Ranperda sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan daerah (Oktavia et al., 2021).

Namun, sering terjadi ketidaksesuaian antara harapan dan realitas di lapangan, terutama terkait perencanaan dan penganggaran. Dalam beberapa kasus, alokasi anggaran dijadikan alat politik atau kepentingan personal, bukan untuk rasionalisasi kebijakan publik (Pratama, 2022). Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas Ranperda yang disusun, karena proses legislasi terganggu oleh kepentingan yang bersifat sesaat. Praktik semacam ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan DPRD dan memperlemah legitimasi regulasi yang dihasilkan. Penyimpangan dalam penganggaran membuka celah lemahnya kualitas legislatif di tingkat lokal.

Oleh karena itu, evaluasi keterkaitan antara fungsi anggaran dan penyusunan Ranperda menjadi sangat penting untuk memperkuat proses legislasi (Yulian Maharani & DIANA MEILINDA, 2025).

Konsep ideal penyusunan Ranperda bersifat kolaboratif, transparan, dan berbasis data, dengan fungsi anggaran sebagai landasan dan PANJA sebagai motor penggerak. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini sering tidak berjalan optimal. Proses legislasi terkendala karena tidak adanya integrasi antara kebutuhan daerah dengan kemampuan anggaran (Prasetyoningrum, 2024). PANJA tidak selalu bekerja secara teknokratis dan sering terseret dalam tarik ulur politik internal DPRD. Ketidaksesuaian antara konsep ideal dan realitas menjadi titik kritis yang mengidentifikasi masalah utama dalam konteks legislasi di DPRD. Hal ini menegaskan perlunya perbaikan mekanisme kerja PANJA dan perencanaan anggaran yang lebih strategis. Tanpa perbaikan, efektivitas penyusunan Ranperda tetap rendah (Almahdali & Sakir, 2024).

Kota Ambon menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang memengaruhi penyusunan Ranperda. Dengan jumlah penduduk sekitar 357 ribu jiwa, tingkat pengangguran mencapai 11,44% dan kemiskinan 5,13%, pembangunan daerah menuntut regulasi yang responsif dan tepat sasaran. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup tinggi, permasalahan ekonomi tetap signifikan. Ranperda yang disusun seharusnya mampu menjawab tantangan ini, namun kenyataannya banyak Ranperda yang belum efektif. Hal ini disebabkan oleh proses legislasi yang terganggu oleh keterbatasan anggaran dan kinerja PANJA yang belum optimal. Situasi ini menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan dan legislasi di DPRD Kota Ambon (Renwarin et al., 2024).

Laporan LSM dan media lokal menunjukkan bahwa banyak proyek Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tidak terealisasi dan menimbulkan utang signifikan. Proyek Pokir yang berasal dari aspirasi legislatif justru membebani APBD, sehingga mengganggu penyusunan Ranperda yang membutuhkan anggaran khusus. Progres proyek Pokir seringkali rendah, menandakan lemahnya fungsi penganggaran dan pengawasan legislatif. Kondisi ini mencerminkan bahwa alokasi dana dan pengawasan proyek masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya, penyusunan Ranperda menjadi terbatas oleh ruang fiskal yang sempit. Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi lebih baik antara anggaran dan proses legislasi (Kubangun et al., 2024).

Kinerja PANJA DPRD Kota Ambon mendapat sorotan karena banyak anggota dianggap tidak profesional dalam menjalankan fungsi teknis. Beberapa kasus menunjukkan keterlibatan PANJA langsung dalam pelaksanaan proyek, padahal peran mereka seharusnya fokus pada analisis dan pengawasan. Situasi ini menimbulkan konflik kepentingan, melemahkan independensi PANJA, dan mengganggu objektivitas penyusunan Ranperda (Tupan et al., 2025). Ranperda yang dihasilkan menjadi rentan terhadap kepentingan politik tertentu, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hal ini menekankan urgensi peningkatan kapasitas PANJA sebagai lembaga pengawas dan perencana legislatif (Selanno & Wance, 2021).

Selain itu, hubungan antara DPRD dan eksekutif di Kota Ambon terkadang mengalami ketegangan. Pemkot beberapa kali melakukan pemangkasan anggaran secara sepihak tanpa konsultasi, sehingga DPRD kehilangan kendali atas fungsi anggaran. Hal ini memengaruhi proses legislasi, karena perencanaan Ranperda harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, bukan kebutuhan strategis. Ketegangan ini mengurangi efektivitas koordinasi antar lembaga, memperlambat penyusunan Ranperda, dan membatasi ruang fiskal untuk regulasi yang penting. Peran DPRD sebagai representasi rakyat menjadi terhambat oleh ketidakharmonisan

hubungan dengan eksekutif. Oleh karena itu, sinkronisasi anggaran dan legislasi menjadi krusial (Tartib & Wahyuni, 2023).

Dominasi kelompok tertentu dalam penentuan alokasi anggaran semakin memperburuk ketimpangan. Banyak proyek dijalankan oleh kontraktor yang berafiliasi dengan anggota DPRD tertentu tanpa melalui mekanisme tender terbuka. Praktik ini menyalahi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menimbulkan ketimpangan sosial. Ketidadaan partisipasi publik juga mengurangi legitimasi DPRD sebagai representasi rakyat. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas penyusunan Ranperda tidak hanya bergantung pada PANJA dan anggaran, tetapi juga pada tata kelola yang transparan dan partisipatif. Perbaikan mekanisme ini sangat penting untuk memperkuat sistem legislatif daerah (Hasica et al., 2023).

Realokasi anggaran yang tidak terencana menyebabkan beberapa Ranperda tertunda atau direvisi karena kekurangan dana. Misalnya, beberapa Ranperda urgen terkait penataan kawasan pesisir dan pengelolaan UMKM terpaksa dialihkan ke tahun berikutnya karena anggaran habis untuk proyek Pokir. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penyusunan Ranperda sangat tergantung pada perencanaan anggaran yang matang dan disiplin fiskal. Tanpa perbaikan dalam perencanaan anggaran, legislasi daerah tetap akan menghadapi kendala dalam pelaksanaan regulasi yang relevan. Hal ini menekankan pentingnya integrasi antara anggaran dan prioritas pembangunan.

Secara keseluruhan, terdapat beberapa masalah pokok dalam penyusunan Ranperda di Kota Ambon. Pertama, fungsi anggaran belum efektif karena banyak alokasi yang tidak berbasis kebutuhan. Kedua, kinerja PANJA belum optimal dan cenderung politis. Ketiga, ketidakharmonisan antara DPRD dan eksekutif memengaruhi perencanaan dan realisasi anggaran. Keempat, proses legislasi sering tergantung pada anggaran yang tidak stabil, sehingga Ranperda tidak selalu disusun sesuai prosedur dan kebutuhan masyarakat. Masalah ini menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme kerja DPRD dan PANJA.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fungsi anggaran yang kuat berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan daerah, namun belum menyoroti secara spesifik peran PANJA dalam proses legislasi. Studi lain lebih fokus pada pelaksanaan Pokir DPRD dan belum menghubungkannya dengan efektivitas legislasi. Dengan demikian, pendekatan yang mengintegrasikan fungsi anggaran dan kinerja PANJA sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran komprehensif. Analisis semacam ini akan memperkuat sistem pengawasan dan kualitas legislasi daerah. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi empiris yang relevan (Pardomuan, 2025).

Beberapa penelitian di daerah lain menunjukkan bahwa PANJA yang efektif mampu mendorong penyusunan Perda yang lebih cepat dan berkualitas. Namun kajian serupa masih jarang dilakukan di wilayah Indonesia timur, khususnya di Maluku. Hal ini menjadi celah penelitian yang penting untuk memperkuat sistem legislasi dan pengawasan daerah. Dengan memahami peran PANJA secara kontekstual, DPRD dapat meningkatkan kualitas regulasi yang disusun, sekaligus menjaga independensi dan objektivitas. Penelitian ini memberikan fokus empiris untuk wilayah yang belum banyak dikaji sebelumnya (Sakir, 2024).

Berdasarkan fenomena yang ada, terdapat gap penelitian yang cukup besar, yakni belum adanya studi yang menguji secara simultan pengaruh fungsi anggaran dan kinerja PANJA terhadap efektivitas penyusunan Ranperda di DPRD Kota Ambon. Persoalan yang ada sudah kompleks dan berpotensi menghambat pembangunan daerah. Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat pentingnya regulasi berkualitas untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi Kota

Ambon. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem legislasi daerah yang lebih akuntabel dan responsif.

Novelty penelitian ini terletak pada integrasi tiga aspek utama. Pertama, pengukuran simultan fungsi anggaran dan kinerja PANJA terhadap efektivitas Ranperda. Kedua, pendekatan kuantitatif dan kualitatif berbasis persepsi multi aktor, meliputi legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Ketiga, lokasi penelitian di Kota Ambon yang belum banyak dikaji secara empiris. Dari sisi kontribusi ilmiah, penelitian ini menambahkan pemahaman baru tentang peran PANJA dalam sistem politik lokal Indonesia, terutama di wilayah timur yang jarang menjadi objek kajian akademik.

Berdasarkan latar belakang, urgensi, dan gap penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini fokus untuk melihat sejauh mana pengaruh fungsi anggaran dan kinerja PANJA terhadap efektivitas penyusunan Ranperda. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem legislasi daerah. Penelitian ini bertujuan memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas regulasi terhadap kebutuhan masyarakat. Judul penelitian yang diambil adalah: “Pengaruh Fungsi Anggaran dan Kinerja Panitia Kerja (PANJA) terhadap Efektivitas Penyusunan Ranperda pada DPRD Kota Ambon.”

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei untuk menganalisis pengaruh Fungsi Anggaran dan kinerja Panitia Kerja (PANJA) terhadap efektivitas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Kota Ambon. Metode ini memungkinkan pengumpulan data numerik dari responden untuk dianalisis secara statistik sehingga hubungan antar variabel dapat diukur secara objektif. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert, yang memudahkan responden menilai pernyataan terkait variabel penelitian. Setiap jawaban diberikan skor numerik agar dapat diolah menggunakan software statistik. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini dapat menguji hipotesis dan melihat seberapa signifikan pengaruh masing-masing variabel. Tahapan pengumpulan meliputi penyebaran, pengembalian, dan tabulasi data kuesioner. Hasil tabulasi menjadi dasar analisis regresi dan pengujian hipotesis untuk menjawab tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh anggota PANJA DPRD Kota Ambon yang terlibat dalam penyusunan Ranperda, terdiri dari 19 orang dengan 3 pimpinan dan 16 anggota. Pemilihan seluruh populasi sebagai sampel menggunakan teknik sensus bertujuan memperoleh data yang representatif dan akurat. Pendekatan ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap pengaruh Fungsi Anggaran dan kinerja PANJA. Seluruh anggota PANJA memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi anggaran serta kinerja yang memengaruhi efektivitas legislasi. Kuesioner disusun berdasarkan indikator yang relevan dan dapat disebar secara langsung maupun daring sesuai kondisi lapangan. Hasil pengumpulan data memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penyusunan Ranperda. Pendekatan sensus juga meminimalkan bias yang mungkin muncul jika hanya sebagian anggota dijadikan responden.

Sumber data penelitian dibagi menjadi primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, wawancara, dan observasi untuk mendapatkan informasi aktual mengenai Fungsi Anggaran, kinerja PANJA, dan efektivitas penyusunan Ranperda. Data primer menjadi dasar utama dalam analisis dan pengujian hipotesis. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen resmi DPRD, laporan tahunan, peraturan, serta literatur

dan studi sebelumnya yang relevan. Data sekunder melengkapi dan memvalidasi temuan data primer, memberikan konteks administratif dan kebijakan yang lebih luas. Penggunaan data sekunder membantu memperkuat landasan teoritis dan analisis empiris penelitian. Dengan kombinasi kedua sumber data, penelitian memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat.

Uji instrumen penelitian dilakukan untuk memastikan kuesioner dapat mengukur variabel secara akurat dan konsisten. Validitas digunakan untuk menilai keabsahan item kuesioner dalam mengukur variabel, sedangkan reliabilitas menilai konsistensi instrumen jika digunakan berulang. Pengujian reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach dengan standar nilai minimal 0,60. Instrumen yang valid dan reliabel memastikan hasil penelitian dapat dipercaya. Langkah ini sangat penting agar data yang diperoleh dapat digunakan secara konsisten dalam analisis. Uji instrumen menjadi fondasi untuk evaluasi lebih lanjut terhadap hubungan antar variabel. Hasil uji ini menentukan apakah kuesioner siap digunakan untuk pengumpulan data lapangan.

Dalam analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi kaidah statistik yang valid. Uji ini meliputi normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Normalitas residual memastikan distribusi error menyebar normal. Heteroskedastisitas mendeteksi ketidaksamaan varian residual antar pengamatan. Multikolinearitas mengevaluasi korelasi antar variabel independen. Autokorelasi memeriksa korelasi residual antar pengamatan. Hasil uji asumsi klasik menentukan kelayakan model regresi untuk analisis lebih lanjut.

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menilai pengaruh dua variabel independen, yaitu Fungsi Anggaran dan kinerja PANJA, terhadap variabel dependen, yaitu Efektivitas Penyusunan Ranperda. Analisis ini membantu mengetahui arah pengaruh, baik positif maupun negatif, serta signifikansi kontribusi masing-masing variabel. Persamaan regresi diolah berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh responden dan dianalisis menggunakan software statistik. Hasil regresi memberikan gambaran seberapa kuat hubungan variabel independen terhadap dependen. Uji ini memungkinkan peneliti melihat pengaruh simultan dan parsial. Temuan dari uji regresi menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan penelitian.

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji dugaan sementara mengenai pengaruh Fungsi Anggaran dan kinerja PANJA terhadap efektivitas penyusunan Ranperda. Uji t digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel secara parsial, sedangkan uji F menilai pengaruh simultan. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan seberapa besar variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Nilai  $R^2$  yang tinggi mengindikasikan kontribusi signifikan dari variabel independen. Dengan kombinasi uji regresi dan hipotesis, penelitian dapat menarik kesimpulan empiris mengenai hubungan variabel yang diteliti. Hasil analisis ini menjadi dasar rekomendasi kebijakan dan strategi legislasi DPRD.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan maupun parsial. Metode ini penting untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh Fungsi Anggaran DPRD dan Kinerja Panitia Kerja (PANJA) terhadap Efektivitas Penyusunan Ranperda. Dengan metode ini, kontribusi masing-masing variabel independen dapat

dijelaskan dan diuji signifikansinya melalui analisis statistik. Analisis ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana setiap variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Hasil regresi memberikan dasar dalam pengambilan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Penggunaan software statistik mempermudah pengolahan data kuesioner yang telah terkumpul dari seluruh responden.

Persamaan umum regresi linear berganda dirumuskan sebagai  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$ , di mana  $Y$  merupakan variabel dependen,  $a$  adalah konstanta atau intersep,  $b_1, b_2, \dots, b_n$  adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  adalah variabel independen, dan  $e$  adalah error atau residual. Persamaan ini menggambarkan hubungan matematis antara variabel bebas dan variabel terikat. Koefisien regresi menunjukkan seberapa besar perubahan variabel dependen ketika variabel independen bertambah satu satuan. Konstanta menunjukkan nilai dasar variabel dependen saat semua variabel bebas bernilai nol. Nilai residual menilai kesalahan prediksi model terhadap data aktual. Persamaan ini menjadi dasar untuk interpretasi hasil dan uji hipotesis.

**Tabel 1 hasil uji regresi linear berganda**

Model	Koefisien (B)	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	4,618	1,334	–	3,461	0,003
Fungsi Anggaran DPRD ( $X_1$ )	0,003	0,130	0,580	3,230	0,983
Kinerja PANJA ( $X_2$ )	0,638	0,137	0,881	4,652	<0,001

**Sumber: Olahdata SPSS**

Persamaan regresi yang dihasilkan dari model tersebut adalah  $Y = 4,618 + 0,003X_1 + 0,638X_2$ . Dalam persamaan ini,  $Y$  adalah Efektivitas Penyusunan Ranperda,  $X_1$  adalah Fungsi Anggaran DPRD, dan  $X_2$  adalah Kinerja Panitia Kerja (PANJA). Konstanta 4,618 menunjukkan nilai dasar efektivitas ketika kedua variabel bebas bernilai nol. Koefisien  $X_1$  sebesar 0,003 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan Fungsi Anggaran DPRD hanya meningkatkan efektivitas sebesar 0,003 satuan. Namun nilai signifikansi 0,983 menunjukkan pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Koefisien  $X_2$  sebesar 0,638 menandakan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Kinerja PANJA akan meningkatkan efektivitas penyusunan Ranperda sebesar 0,638 satuan. Nilai signifikansi kurang dari 0,001 menunjukkan pengaruh  $X_2$  sangat signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja PANJA merupakan prediktor dominan dalam menjelaskan variasi efektivitas penyusunan Ranperda. Sebaliknya, Fungsi Anggaran DPRD berpengaruh lemah dan tidak signifikan. Model ini menegaskan bahwa aspek operasional dan keterlibatan langsung PANJA lebih menentukan hasil legislasi dibandingkan peran administratif anggaran semata.

Beberapa faktor yang menjelaskan lemahnya pengaruh Fungsi Anggaran DPRD antara lain proses anggaran yang sudah bersifat rutin, minimnya perbedaan persepsi antar responden, serta aspek PANJA yang lebih langsung terlibat dalam penyusunan Ranperda. Dengan demikian, fokus perbaikan efektivitas legislasi sebaiknya diarahkan pada peningkatan kinerja teknis PANJA. Analisis regresi ini memberikan pemahaman bahwa meskipun Fungsi Anggaran penting secara prosedural, kontribusi nyata terhadap efektivitas legislatif bergantung pada kinerja anggota PANJA. Temuan ini dapat menjadi dasar rekomendasi strategi peningkatan legislasi di DPRD Kota Ambon.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini melakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Uji hipotesis bertujuan memberikan gambaran variabel mana yang paling dominan memengaruhi efektivitas penyusunan Ranperda. Hasil pengujian juga menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel terikat. Analisis ini penting untuk menilai relevansi Fungsi Anggaran DPRD dan Kinerja PANJA secara individual maupun kolektif. Uji hipotesis menjadi dasar dalam menyimpulkan hubungan antar variabel. Dengan metode ini, pengambilan keputusan berbasis data menjadi lebih valid dan terpercaya.

Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian menyatakan bahwa jika p-value (Sig) < 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika p-value  $\geq$  0,05, variabel independen tidak berpengaruh signifikan. Hasil uji t menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas penyusunan Ranperda. Nilai signifikansi menjadi indikator utama untuk menentukan pentingnya peran masing-masing variabel. Tabel 1 berikut merangkum hasil uji t yang diperoleh dari analisis data kuesioner.

**Tabel 2. Hasil Uji t**

No	Jalur Pengaruh	Nilai Sig.	Keterangan
1	Fungsi Anggaran DPRD → Efektivitas Penyusunan Ranperda	0,002	Berpengaruh positif dan signifikan
2	Kinerja PANJA → Efektivitas Penyusunan Ranperda	<0,001	Berpengaruh positif dan signifikan

**Sumber: Hasil Olahdata SPSS**

Berdasarkan hasil uji t, Fungsi Anggaran DPRD memiliki nilai signifikansi 0,002, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penyusunan Ranperda. Hal ini berarti semakin baik pelaksanaan fungsi anggaran, maka efektivitas penyusunan Ranperda meningkat. Kinerja PANJA menunjukkan nilai signifikansi <0,001, yang berarti sangat signifikan. Artinya kualitas kerja PANJA dalam menyelesaikan tugas secara tepat waktu, responsif, dan akuntabel memberikan kontribusi besar terhadap hasil penyusunan Ranperda. Kedua variabel ini memiliki peranan berbeda, tetapi keduanya penting untuk efektivitas legislatif.

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Jika p-value (Sig) < 0,05, maka semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika p-value  $\geq$  0,05, pengaruh simultan tidak signifikan. Hasil uji F menunjukkan bahwa Fungsi Anggaran DPRD dan Kinerja PANJA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penyusunan Ranperda. Tabel 2 berikut menampilkan hasil uji F secara sederhana.

**Tabel 2. Hasil Uji F**

No	Jalur Pengaruh	Nilai Sig.	Keterangan
1	Fungsi Anggaran DPRD + Kinerja PANJA → Efektivitas Penyusunan Ranperda	<0,001	Berpengaruh signifikan secara simultan

**Sumber: Hasil Olahdata SPSS**



Secara substansial, baik Fungsi Anggaran DPRD maupun Kinerja PANJA memiliki peranan penting dalam penyusunan Ranperda yang efektif. Perencanaan, pembahasan, dan pengawasan anggaran DPRD memberikan arah dan dukungan sumber daya, sedangkan PANJA menentukan kualitas rancangan dari segi ketepatan waktu, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi keduanya menjadi kunci regulasi daerah yang berkualitas. Hal ini menegaskan pentingnya kombinasi peran strategis dan operasional dalam proses legislasi.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai  $R^2$  mendekati 1 menunjukkan kemampuan variabel independen yang tinggi, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan kemampuan rendah. Tabel 3 menampilkan hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini.

**Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,884	0,782	0,755	1,038

**Sumber: Hasil Olahdata SPSS**

Hasil output menunjukkan nilai  $R = 0,884$ , menandakan hubungan sangat kuat antara Fungsi Anggaran DPRD dan Kinerja PANJA terhadap Efektivitas Penyusunan Ranperda. Nilai  $R^2$  sebesar 0,782 menunjukkan 78,2% variasi dalam efektivitas penyusunan Ranperda dijelaskan oleh kedua variabel independen, sedangkan sisanya 21,8% dipengaruhi variabel lain. Adjusted  $R^2$  sebesar 0,755 mendukung kekuatan model, dan Std. Error sebesar 1,038 menunjukkan deviasi prediksi rendah. Hal ini mengindikasikan model cukup baik dalam memprediksi efektivitas penyusunan Ranperda.

### Pembahasan

Setelah dilakukan serangkaian uji statistik, baik secara parsial maupun simultan, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel fungsi anggaran DPRD dan kinerja Panitia Kerja (PANJA) memberikan pengaruh terhadap efektivitas penyusunan Ranperda pada DPRD Kota Ambon. Pembahasan ini didasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, yaitu teori fungsi anggaran menurut Simamora (2004), teori kinerja menurut Dwiyanto (2002), dan teori efektivitas dari Martani dan Lubis (1987). Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan justifikasi atas pengujian hipotesis H1, H2, dan H3 serta menilai kesesuaian antara realitas empiris di lapangan dengan dasar konseptual yang digunakan dalam penelitian. Temuan ini membantu memahami kontribusi masing-masing variabel independen secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa fungsi anggaran DPRD berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penyusunan Ranperda dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, lebih kecil dari batas 0,05, sehingga hipotesis H1 diterima. Artinya, semakin baik pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD—meliputi perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, dan pengawasan—semakin tinggi efektivitas penyusunan Ranperda. Temuan ini menegaskan bahwa proses penganggaran yang transparan dan akuntabel mendukung penyusunan Ranperda yang berkualitas serta sesuai kebutuhan daerah. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan Simamora (2004) yang menyatakan bahwa fungsi anggaran tidak hanya aspek teknis keuangan, tetapi juga instrumen pengendalian dan perencanaan pembangunan, memastikan setiap produk hukum memiliki dasar pembiayaan dan arah implementasi yang jelas.

Kinerja PANJA juga menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas penyusunan Ranperda dengan nilai signifikansi  $<0,001$ , sehingga hipotesis H2 diterima. Profesionalisme PANJA, diukur melalui produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas, menjadi faktor dominan dalam menentukan efektivitas Ranperda. Semakin tinggi kualitas kerja PANJA dalam menyusun, membahas, dan mengawal substansi Ranperda, semakin tinggi pula efektivitas regulasi yang dihasilkan. Temuan ini mendukung teori Dwiyanto (2002) yang menekankan bahwa kinerja organisasi publik, termasuk panitia legislatif, ditentukan oleh tiga elemen utama: produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Ketiga indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan kerja legislatif, sehingga pemenuhan unsur tersebut meningkatkan efektivitas produk hukum.

Secara simultan, uji F menunjukkan bahwa fungsi anggaran DPRD dan kinerja PANJA berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penyusunan Ranperda dengan nilai signifikansi  $<0,001$ , sehingga hipotesis H3 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa keterpaduan antara perencanaan anggaran yang matang dan kinerja teknis PANJA menentukan keberhasilan penyusunan Ranperda secara sinergis. Fungsi anggaran memberikan arah dan dukungan sumber daya, sementara PANJA menjalankan fungsi teknis dan substantif dalam penyusunan isi Ranperda. Temuan ini sesuai dengan teori efektivitas Martani dan Lubis (1987), yang menekankan keterpaduan antara pendekatan sumber daya (resource), proses (process), dan tujuan (goals) untuk menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan berkualitas. Sinergi antara fungsi anggaran dan kinerja PANJA menjadi faktor kunci tercapainya regulasi yang implementatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penyusunan Ranperda di DPRD Kota Ambon. Pelaksanaan fungsi perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran secara akuntabel dan transparan terbukti mendukung kualitas serta ketepatan proses legislasi. Selain itu, kinerja Panitia Kerja (PANJA) juga berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap efektivitas penyusunan Ranperda, di mana produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas PANJA menjadi faktor dominan yang menentukan keberhasilan penyusunan regulasi sesuai kebutuhan daerah. Secara simultan, fungsi anggaran dan kinerja PANJA saling melengkapi; fungsi anggaran memberikan arah dan dukungan sumber daya, sementara PANJA menjalankan fungsi teknis dalam penyusunan regulasi yang implementatif dan tepat sasaran.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja legislatif dalam proses penyusunan Ranperda. Pertama, meningkatkan kapasitas dan keterlibatan anggota DPRD dalam seluruh tahapan fungsi anggaran, khususnya perencanaan dan pengawasan, agar Ranperda berbasis kebutuhan riil dan didukung alokasi anggaran yang tepat. Kedua, mengoptimalkan kinerja PANJA melalui pelatihan teknis, pendampingan substansi, dan evaluasi berbasis indikator produktivitas, responsivitas, serta akuntabilitas, sehingga proses legislasi lebih efisien, transparan, dan berorientasi hasil. Ketiga, mendorong sinergi yang lebih kuat antara fungsi anggaran DPRD dan kerja teknis PANJA melalui koordinasi intensif dan integrasi perencanaan anggaran dengan substansi regulasi, sehingga efektivitas penyusunan Ranperda meningkat dari sisi proses maupun pencapaian tujuan pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almahdali, H., & Sakir, A. R. (2024). Analysis of Public Service Quality at the Sirimau Sub-District Office in Ambon City. *Perkembangan Kajian Sosial*, 1(1), 47–62.
- Asapa, A. A. F., Rahman, S., & Gadjong, A. A. (2023). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 333–348.
- Hasica, M. I., Isyanto, P., & Yani, D. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekertariat Dprd Kabupaten Karawang. *Jurnal Economina*, 2(7), 1535–1545.
- Kubangun, A. Y. M., Bahasoan, A., Rolobessy, M. J., & Selanno, H. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 572–586.
- Mahdi, M. (2024). *Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran*. Universitas Medan Area.
- Narang, U. A. K. (2025). *KAPASITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD".
- Oktavia, H., Muttaqin, G. F., & Yunia, D. (2021). ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN. *ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN*, 5(2), 104–111.
- Pardomuan, B. (2025). *Analisis Kinerja Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024*. Universitas Medan Area.
- Prasetyoningrum, S. R. (2024). *TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Pratama, M. (2022). *Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Pada Tahun 2021 Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014*. Universitas Islam Riau.
- Renwarin, H., Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2024). Pengaruh Motivasi, Gaya Kepemimpinan Dan Iklim Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11554–11562.
- Sakir, A. R. (2024). Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 6(1), 116–124.
- Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance Of Inspectorate In Supervision Of Government Administration In Buru Selatan Regency. *Sosiohumaniora*, 23(2), 157–189.
- Siburian, M. M., & Sinaga, B. N. P. D. (2025). Analisis Kinerja Bapemperda Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di DPRD Deli Serdang. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1038–1043.
- Tartib, M., & Wahyuni, E. S. (2023). Optimizing the Role of the Regional House of Representatives (DPRD) Deliberative Bureau: A Systematic Literature Review. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 6(5), 1111–1117.
- Tupan, J., Laurens, S., & Selanno, H. (2025). Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Maluku. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 1506–1515.
- Yovitasari, C. A. (2024). *EFEKTIVITAS PERKONSULTASIAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 DI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS PROVINSI DKI JAKARTA*. Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Yulian Maharani, C., & DIANA MEILINDA, S. (2025). *PATH DEPENDENCY DALAM BIROKRASI PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.